

THE ROLE OF SULTAN HAMENGKU BUWONO IX IN UPHOLDING
INDONESIAN INDEPENDENCE IN 1945-1950

Ony Widiarto¹, Sugiyanto², Marjono³

¹²³History Education Program, The University of Jember.

Email: Onywidiar23@gmail.com

Abstract

The background of this research is after the Indonesian nation became independent until the change of form of the Indonesian state which was originally since KMB (Konferensi Meja Bundar) is a federal state back into the form of unitary state (1945-1950). Indonesia's chaotic condition in the social, political and economic fields prompted Sultan Hamengku Buwono IX to apply the rescue action of the Republic of Indonesia. This study aims to (1) examine the background of Hamengku Buwono IX in maintaining the independence of the Republic of Indonesia; (2) to examine in depth the actions or strategies of Hamengku Buwono IX in maintaining the independence of the Republic of Indonesia in 1945-1950. This study uses historical research methods with heuristic steps, criticism, interpretation, and historiography. Sultan Hamengku Buwono IX retained the independence of the Republic of Indonesia, preventing the Dutch crime in Jakarta, which moved the capital in Yogyakarta. When the capital of Yogyakarta in the attack of Sultan Hamengku Buwono IX, became a savior and dared to arrange a counterattack. Sultan Hamengkubuwono IX accelerated the process of recognition of Indonesian independence. However, a new problem arose in the form of Westerling insurrection and Sultan Hamid II. Sultan Hamengkubuwono IX managed to prevent and make people not believe in the federalists. This is what makes the return of the state form into a unitary state.

Keywords: Sultan, Defend, Independence, Republic Indonesia.

PENDAHULUAN

Sultan Hamengku Buwono IX merupakan seorang raja yang menentang kolonialisme. Ketika Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya melalui sikap demokrasi dan optimismenya. Sultan Hamengku Buwono IX memanfaatkan keadaan tersebut untuk menjauhkan segala bentuk kolonialisme dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan Hamengku Buwono IX tidak hanya turut bergabung dengan Republik Indonesia. Proses mempertahankan kemerdekaan dari tindakan Belanda untuk merebut kembali tanah Republik Indonesia yang baru saja merdeka, Sultan Hamenku Buwono IX turut andil dalam mencegahnya.

Sultan Hamengku Buwono IX tidak hanya berperan terhadap pemindahan Republik Indonesia saja. Ketika di Yogyakarta terjadi kepadatan penduduk akibat banyaknya pengungsi pada masa Agresi Militer Belanda I, Sultan Hamengku Buwono IX membantu Republik Indonesia untuk menampung dan memeberikan berbagai sumbangannya (Darban, 1998:50). Pengorbanan yang besar terhadap Republik Indonesia membuktikan bahwa Sultan benar-benar ingin merdeka dari kekuasaan asing. Selain itu, jiwa demokratis dan optimis selalu menjadi dasar tanggungjawab Sultan terhadap kelangsungan kemerdekaan Republik Indonesia.

Tanggung jawab terbesar Sultan Hamengku Buwono IX, terjadi ketika pasukan Belanda berhasil menembus pertahanan di Yogyakarta. para pemimpin Republik Indonesia diasingkan. Belanda merasa berhasil melakukan Agresi Militer II dan menganggap bahwa akan mudah merebut keuasaan karena tidak adanya para pemimpin Republik Indonesia. Pada saat para pemimpin diasingkan, ternyata Sultan Hamengku Buwono IX memiliki kontribusi besar kepada kelangsungan Republik Indonesia. keadaan seperti ini kemudian dimanfaatkan untuk menyusun strategi Serangan. Hal tersebut akhirnya berhasil menghasilkan serangan yang dilaksanakan pada 1 Maret 1949. Sultan Hamengku Buwono IX berperan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa pertahanan Republik Indonesia masih ada (Sumiyati dkk. 2001:46). Selain itu, Sultan Hamengku Buwono IX juga ingin memberikan semangat kepada rakyat, jika kemerdekaan Republik Indonesia harus terus diperjuangkan.

Pada 27 Desember 1949 dalam Konferensi Meja Bundar, Sultan Hamengku Buwono IX diberikan mandat penyerahan kedaulatan di Jakarta. Penyerahan kedaulatan itu ditandatangani oleh Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil Republik Indonesia dan Johannes Lovink sebagai wakil Belanda. Perjanjian ini memutuskan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi terbentuknya bentuk negara federal membuat berbagai kalangan melakukan pemberontakan untuk menguatkan posisinya sebagai orang-orang federalis. Sultan menyadari pemberontakan tersebut akan mengancam rakyatnya. Sehingga pemberontakan pertama yaitu Westerling dan Sultan Hamid II berhasil diselesaikan. Hal ini mengakibatkan rakyat semakin tidak percaya dengan bentuk negara federal dan menginginkan bentuk negara kesatuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang Hamengku Buwono IX mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia; bagaimana tindakan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1950. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah mengkaji secara mendalam latar belakang Hamengku Buwono IX mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia; mengkaji secara mendalam tindakan atau strategi Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1950. Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti, yaitu bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk mendalami materi sejarah pada masa 1945-1950 dan tokoh Sultan Hamengku Buwono IX; bagi calon guru sejarah, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan materi mengenai sejarah Indonesia masa 1945-1950 dan peranan tokoh Sultan Hamengku Buwono IX; bagi pemuda, penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan semangat untuk mencintai Republik Indonesia, menjaga persatuan, dan menghargai pengorbanan para pahlawan; bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan, referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menambah khasanah kepustakaan Universitas Jember.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschlak, 1986:32). Langkah pertama adalah heuristik, dalam tahap ini penulis berusaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan “Peran Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun

1945-1950”. Penulis telah mendapatkan sumber primer berupa arsip mengenai Menteri Koordinator Keamanan dan koran sejawan. Sedangkan untuk sumber sekunder penulis menggunakan buku para ahli yang meneliti tentang Sultan Hamengku Buwono IX dan sekitar peristiwa pada tahun 1945-1950. Langkah kedua yang peneliti lakukan adalah kritik. Langkah ini dilakukan jika, topik dan sumber-sumber telah dikumpulkan, menjelaskan bahwa kritik itu terdapat dua macam, yaitu: (1) kritik ekstern, dan (2) kritik intern. Langkah ketiga pada penelitian ini setelah melakukan kritik terhadap sumber, yaitu peneliti akan memasuki tahap interpretasi. Interpretasi sejarah sering juga disebut sebagai analisis sejarah. Dalam melakukan analisis dan sintesis, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi politik dan teori konflik milik Lewis Coser.

Langkah keempat atau tahapan terakhir dalam penelitian ini mensintesa dari pada sumber-sumber yang telah diperoleh secara terpercaya, yaitu historiografi (Gottchalk 1985:32). Setelah melewati tahap heuristik, kritik, dan interpretasi. Langkah ini penulis menyusun, merangkai, dan menulis sejarah secara kronologis, logis, dan sistematis sehingga dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang menarik dengan demikian dapat merekonstruksi mengenai “Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1950”.

HASIL DAN PEMBAHASAN LATAR BELAKANG SULTAN HAMENGKU BUWONO IX MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN RI TAHUN 1945-1950

Menelaah peran Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1950, dirasa sangat penting untuk mengetahui berbagai latar belakang tindakan-tindakannya. Sehingga pembahasan akan bersinggungan dengan sikap yang dimiliki Sultan Hamengku Buwono IX, yaitu sikap demokratis dan sikap optimisme.

Sikap Demokratis

Sultan Hamengku Buwono IX memiliki nama lahir, yaitu Dorodjatun lahir pada tanggal 12 April 1912. Sikap demokratis Dorodjatun telah dibentuk sejak kecil, ketika ayahnya melakukan cara mendidik anak yang lain dari pada pendahulunya. Pilihan ayahnya, Hamengku Buwono VIII dalam memberikan pendidikan pada putra-putranya, yaitu menjauhkan hidup penuh sanjungan dan selalu dimanja di dalam keraton. Karena membiasakan hidup penuh sanjungan dan dimanja akan tidak menguntungkan bagi kemajuan putra-putranya. Sehingga kepribadian putra-putranya diharuskan untuk hidup mandiri. Sejak kecil Dorodjatun diberikan pendidikan modern dan dititipkan kepada kenalannya dari keluarga Belanda (Majalah Tempo, 1988:17-18). Kondisi dalam lingkungan keluarga Belanda dapat mempengaruhi pembentukan karakter Dorodjatun.

Dorodjatun memiliki perpaduan landasan budaya pendidikan, yaitu barat dan timur. Pendidikan barat meliputi sekolah modern milik Belanda dan pendidikan timur adalah pendidikan didalam keraton Yogyakarta. Pendidikan dalam sekolah Belanda, mampu mengenalkan kepada Dorodjatun pada nilai-nilai modern yang mengasah rasionalitas, kemandirian, demokrasi, dan sikap disiplin. Sedangkan di dalam keraton Dorodjatun mendapatkan pendidikan internal, untuk mengasah rasa, kepribadian, pitutur, dan berbagai etiket adat tradisi (Suyono, dkk, 2016:39). Sehingga Dorodjatun terbiasa untuk memadukan antara budaya barat dan timur melalui pendidikan. Mmpelajari dua budaya sekaligus akan menjadikan kepribadian Dorodjatun mudah untuk memberikan ruang perbedaan pendapat dan berani untuk memulai perubahan.

Dorodjatun akhirnya dipanggil pulang oleh ayahnya. Ketika Hamengku Buwono VIII wafat, Dorodjatun merupakan putra mahkota. Sultan Hamengku Buwono VIII kemudian mengirim Dorodjatun untuk melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda. Pendidikan Dorodjatun bermula di Hoogere Bruggerschool (HBS) di Harlem dan dilanjutkan di ranah universitas di Rijks Universiteit, kota Leiden, Belanda. Menjadi mahasiswa di Belanda ternyata mampu membukakan wawasan politik yang lebih luas kepada dunia luar. Dorodjatun aktif dalam klub diskusi mengenai politik dan ekonomi yang dipimpin oleh guru besar, yaitu Prof. Schrike. Dorodjatun memang sering mengikuti diskusi politik, tetapi menjauh dari aktifitas pergerakan politik. Karena seorang calon Sultan akan selalu diawasi dan dibatasi segala bentuk tindakannya terkait pergerakan politik (Atmakusuma, 2011:18-20). Akan tetapi, keaktifan Dorodjatun terhadap diskusi politik dan ekonomi, telah membukakan wawasan yang luas terhadap perkembangan dunia internasional.

Dalam tradisi Kasultanan Yogyakarta, salah satu simbol bahwa kekuasaan akan dialihkan kepada keturunannya yang dikehendaki sebagai raja adalah pemberian pusaka

berupa keris Kyai Jaka Piturun. Namun penyerahan pusaka itu masih belum cukup bagi pandangan Dorodjatun (Widyatama, 2017:15). Langkah penting adalah penentuan secara sah secara musyawarah, yaitu pembentukan panitia penentuan sultan baru. Anggota panitia penentuan sultan adalah putra-putra dari Sultan Hamengku Buwono VII dan Sultan Hamengku Buwono VIII. Dalam forum tersebut, Dorodjatun ditunjuk sebagai ketua untuk memimpin musyawarah.

Sikap demokratis Dorodjatun ditunjukkan, ketika akan diambil keputusan dalam musyawarah tersebut. Dorodjatun menanyakan kembali terkait adanya keinginan diantara anggota panitia penentuan sultan yang ingin mencalonkan diri sebagai Sultan Hamengku Buwono IX. Akan tetapi, tidak ada pernyataan mengenai tidak setujunya Dorodjatun diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono IX (Atmakusuma, 2011:16). Sikap ini menyebabkan wibawa Dorodjatun sebagai Sultan Hamengku Buwono IX sangatlah dihargai oleh pihak keluarga. Selain itu, jabatan sebagai Sultan Hamengku Buwono IX dianggap sebagai

tanggungjawab yang besar. Sehingga harus dibicarakan bersama untuk mewujudkan keadilan didalam internal Kasultanan Yogyakarta.

Selain pendidikan modern terdapat suatu perspektif filosofi budaya Jawa, yang membuat seseorang pemimpin dapat bertindak adil dan menolak segala bentuk kejahatan. Seorang raja yang arif haruslah tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, tetapi memihak kepada rakyatnya. Prespektif tersebut secara tidak langsung mengandung maksud bahwa kepemimpinan Jawa sebenarnya penuh dengan nilai-nilai demokrasi. Misalnya, seperti tertuang dalam prinsip sura dira jayaningrat bakal lebur dening pangastuti yang berarti orang yang menyalahgunakan kekuasaan akan hacur oleh orang yang berbudi pekerti luhur. Prinsip tersebut dipegang teguh oleh Sultan Hamengku Buwono IX sehingga setiap keputusan yang akan dikeluarkan cenderung jauh dari kesewenang-wenangan terhadap rakyat (Widyatama, 2017:141). Tindakan penolakan terhadap penjajahan Belanda adalah bentuk dari pedoman hidup tersebut. Sultan Hamengku Buwono IX mempelajari budaya dan karakter orang-orang Belanda dalam dunia pendidikan dan pergaulan. Sehingga berguna untuk menolak kesewenangan dari Belanda dengan cara yang selama ini dipelajari selama remaja.

Sikap Optimis

Salah satu bagian penting dari rangkaian kegiatan penobatan seorang raja adalah pidatonya. Karena didalam pidato penobatan terdapat suatu pandangan serta sikap setelah menjabat sebagai raja dan akan menjadi acuan hidup Sultan Hamengku Buwono IX beserta rakyatnya. Sehingga ketika Sultan Hamengku Buwono IX membuat suatu keputusan, haruslah mencerminkan pidato penobatan tersebut (Widyatama, 2017:19).

Dari pidato tersebut ada dua hal utama yang ingin disampaikan oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Pertama, sebagai seorang tokoh yang telah merasakan pendidikan di Eropa khususnya Belanda. Mempertemukan jiwa Barat, yaitu ide-ide mengenai demokrasi dan etika orang Timur (Jawa) untuk berjalan berdampingan. Inilah yang mengakibatkan Sultan Hamengku Buwono IX optimis untuk menjadi pembaharu. Kedua, Sultan Hamengku Buwono IX adalah menegaskan diri sebagai seorang ingin terlepas dari belenggu penjajahan dan

pembaharu dalam mencapai kesatuan. Oleh karena itu, Sultan Hamengku Buwono IX ingin mengabdikan dirinya untuk kepentingan nusa dan bangsa Kasultanan Yogyakarta. Jika dianalisis, nusa dan bangsa juga dapat diartikan sebagai mempererat rasa persatuan. Pada saat berpidato Sultan Hamengku Buwono IX mengobarkan optimisme seorang pembaharu dan akan memperjuangkan sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada.

Kasultanan Yogyakarta adalah suatu wilayah istimewa sejak zaman Belanda atau biasa disebut wilayah *Voorstenlanden*. Hal ini berarti wilayah Kasultanan Yogyakarta tetap menjadi bagian dari wilayah jajahan pemerintah kolonial Belanda dengan skema jajahan tidak langsung. Status daerah istimewa oleh Jepang ternyata juga masih dilaksanakan (Hadi dan Majidi, 2013:98). Dengan kata lain jika Jepang kalah dalam Perang Dunia II, maka ada kemungkinan bahwa Belanda akan kembali berkuasa di Hindia Belanda dan daerah Yogyakarta kembali menjadi jajahan tidak langsung. Sehingga dibutuhkan persatuan untuk membendung datangnya kekuasaan asing.

Sultan Hamengku Buwono IX tidak begitu saja ingin dikuasai oleh pihak asing. Ketika Indonesia merdeka, Yogyakarta tidak langsung menjadi bagian dari Republik Indonesia yang diproklamasikan. Sultan Hamengku Buwono IX harus memutuskan untuk lebih memilih ikut dengan Republik Indonesia atau merdeka sendiri. Ramalan Jayabaya pada saat itu sangat dipercaya keakuratannya oleh masyarakat Jawa. Sehingga optimisme rakyat untuk lepas dari penjajahan semakin meningkat. Semangat persatuan dari rakyat dimanfaatkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX untuk memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia. Karena Sultan Hamengku Buwono IX juga membutuhkan persatuan yang lebih luas untuk membendung Belanda yang ingin berkuasa kembali. Maka keputusan untuk lebih mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah keputusan yang terbaik daripada memberikan kepada orang asing.

Selain memegang teguh nilai persatuan yang diamanatkan Sultan Hamengku Buwono I, optimisme Sultan Hamengku Buwono IX untuk mempertahankan Republik Indonesia dan menentang kolonialisme juga berasal dari wisik. Dalam kepercayaan raja Jawa, wisik dari nenek moyang dapat

membantu pada saat menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan (Sunoyo dkk, 2016:14). Wisik yang pertama kali dialami Sultan Hamengku Buwono IX ketika mendapat kesulitan dalam kontrak politik dengan Belanda pada tahun 1939. Kontrak politik ini dilakukan oleh Dorodjatun dan Gubernur Lucien Adam. Isi kontrak politik itu sangat merugikan Kasultanan Yogyakarta. Kontrak politik itu berisi tentang kedaulatan Kasultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Meskipun Sultan Hamengku Buwono IX berwenang untuk membuat peraturan untuk kepentingan rakyat, tetapi peraturan tersebut baru sah jika disetujui oleh pihak Belanda (Baskoro & Sunaryo, 2010:12). Perjanjian ini merupakan persyaratan untuk Raden Mas Dorodjatun menjadi Sultan Hamengku Buwono IX. Pada awalnya Dorodjatun menolak kontrak politik yang merugikan itu. Dorodjatun akhirnya menerima ketika mengalami wisik berupa mimpi bahwa Belanda pasti akan segera keluar meninggalkan Kasultanan Yogyakarta. Karena itu Dorodjatun bertekad untuk menandatangani (Kutoyo, 1996:93).

Sultan menyelaraskan wisik dengan pemikiran yang rasional. Wawasan luas karena pendidikan dan pergaulan pada masa remaja adalah salah satu faktor utamanya. Wawasan mengenai perkembangan politik dunia sebagai landasan pengambilan keputusan, dan wisik sebagai nasihat untuk memutuskan sesuatu. Selain itu Sultan Hamengku Buwono IX juga mempercayai ramalan Jayabaya. Sultan Hamengku Buwono IX membuktikan sendiri kebenaran ramalan Jayabaya tersebut dengan perginya penjajahan Jepang yang hanya seumur jagung. Hal ini juga memicu Sultan Hamengku Buwono IX untuk menyiapkan langkahnya untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

PERAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX MEMPERTAHANKAN RI DI IBUKOTA YOGYAKARTA TAHUN 1945-1950

Sultan Hamengku Buwono IX merupakan penentu berlangsungnya Republik Indonesia. Untuk lebih lanjut, maka diperlukan pembahasan yang lebih analisis pada sub bab dengan lebih mendalam, yaitu (1) peran Sultan Hamengku Buwono IX menghadapi Belanda tahun 1945-1949; (2) peran Sultan Hamengku Buwono IX menjaga keamanan negara tahun 1950.

Peran Sultan Hamengku Buwono IX Menghadapi Belanda Tahun 1945-1949

Sultan Hamengku Buwono pada tahun 1945-1949 menjadi tokoh yang memiliki peranan terhadap utuhnya kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda merupakan penghalang Republik Indonesia dan ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan Sultan Hamengku Buwono IX mengambil tindakan untuk mengamankan Republik Indonesia dari serangan, propaganda, bahkan sampai di meja diplomasi. Maka diperlukan pembahasan yang lebih analisis, mengenai (1) Strategi Sultan Hamengku Buwono IX dalam perpindahan ibukota RI ke Yogyakarta tahun 1946; (2) strategi menghadapi Agresi Militer Belanda 1948-1949; dan (3) perjuangan diplomasi dalam Konferensi Meja Bundar 1949.

a. Strategi Sultan Hamengku Buwono IX dalam Perpindahan Ibukota RI ke Yogyakarta Tahun 1946

Selama September sampai Desember, di Jakarta telah jatuh korban kurang lebih 8000 orang Indonesia. NICA juga mendapat perintah untuk menangkap bahkan membunuh para pemimpin Republik Indonesia. Hal ini membuat Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta terpaksa tidur berpindah-pindah rumah (Adams, 2014:276). Pemimpin Republik Indonesia semakin terancam dan sangat minim perlindungan. Sehingga dapat diputuskan untuk mencari perlindungan dan memindahkan ibukota Republik Indonesia.

Di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX mendengar kabar bahwa Sukarno dan Hatta dalam keadaan tidak aman. Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan surat kepada Sukarno melalui seorang kurir. Surat tersebut berisi

tentang kesiapan Yogyakarta untuk menjadi ibukota Republik Indonesia (Suyono dkk, 2016:19). Keputusan Sultan Hamengku Buwono IX untuk memfasilitasi dan menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia ternyata telah dibicarakan dengan Paku Alam VIII. Sehingga Sultan Hamengku Buwono IX dapat mempersiapkan berbagai fasilitas untuk penyambutan dan tempat tinggal bagi Presiden, Wakil Presiden, beserta staf pemerintahan Republik Indonesia.

Pada tanggal 3 Januari, untuk menanggapi surat ajakan Sultan Hamengku Buwono IX maka diadakan sidang kabinet. Keputusan dalam kabinet, yaitu siap untuk memindahkan ibukota pemerintahan ke Yogyakarta dan siap dengan segala bentuk konsekuensinya (Soekamto, 2009:18). Kondisi rakyat Yogyakarta sangat mendukung adanya Republik Indonesia dan menolak segala bentuk penjajahan asing. Surat balasan untuk memindahkan ibukota dijawab pada hari itu juga dan dikirimkan kepada pemerintahan di Yogyakarta. Pada tanggal 5 Januari 1946 kereta yang dikendarai Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, dan para stafnya akhirnya berhasil sampai di stasiun Tugu Yogyakarta pada pagi hari.

b. Strategi Menghadapi Agresi Militer Belanda 1948-1949

Belanda tidak kehilangan akal untuk menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia dan membentuk negara serikat. Belanda memaksa Republik Indonesia untuk menerima segala usulan dalam pembentukan negara federal. Selain itu, dalam urusan luar negeri dipegang Belanda, sedangkan Indonesia menghendaki adanya kedaulatan penuh (Sumiyati dkk, 2001:12). Mengeni Agresi Militer II, pihak Belanda melihat kelemahan dari Indonesia. Terutama kepada pemberontakan PKI yang membuat kekuatan negara terkuras untuk menumpasnya. Melihat kelemahan ini Belanda untuk melancarkan kepentingan dalam pembentukan negara serikat, maka dilancarkanlah Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

Sebenarnya jauh sebelum Belanda menyerbu Yogyakarta, Wakil Presiden Mohammad Hatta, pernah secara tidak langsung melalui Kolonel Simantupang dan Mohammad Natsir, menanyakan sikap Sultan Hamengku Buwono IX jika pasukan Belanda menduduki Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono IX memilih untuk tetap berada di dalam kota, apapun yang terjadi (Kutoyo, 1996:164).

Tindakan Sultan Merupakan suatu alternatif lain jika para pemimpin Republik Indonesia di asingkan oleh Belanda. Secara tidak langsung Sultan juga menyanggupi untuk menjadi tokoh pelopor pertahanan terakhir di Yogyakarta.

Setelah Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda dan para pemimpin Republik Indonesia diasingkan. Belanda menganggap bahwa akan mudah merebut kekuasaan karena tidak adanya para pemimpin Republik Indonesia. Belanda menjadi percaya diri terhadap keberhasilannya terhadap serangan di Yogyakarta. Langkah pertama setelah berhasil menduduki ibukota Yogyakarta beserta mengasingkan para pemimpinnya, Belanda menawarkan sesuatu yang menggiurkan kepada Sultan Hamengku Buwono IX. Belanda tahu bahwa Sultan Hamengku Buwono IX merupakan benteng pertahanan bagi berdirinya Republik Indonesia. Belanda megajak Sultan Hamengku Buwono IX mendukung Belanda untuk menciptakan negara federal. Sebagai imbalannya Sultan akan dijadikan raja atas Jawa dan Madura. Akan teapi, Sultan Hamengku Buwono IX menolak semua bujukan tersebut (Baskoro dan Sunaryo, 2010:35). Sultan Hamengku Buwono IX menyadari bahwa ajakan Belanda adalah tipu daya untuk menghancurkan kesatuan Republik Indonesia.

Setelah Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Pamong praja di seluruh kota Yogyakarta menyokong pendirian Sultan Hamengku Buwono IX untuk menentang Belanda. Rakyat Yogyakarta tetap memandang Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pemimpin dan bersedia menjalankan tiap keputusan. Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 14 Februari 1949, memanggil Letnan Kolonel Soeharto untuk membicarakan ide serangan balasan kepada Belanda. Pertemuan itu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan sebagai penyamaran, Soeharto diberikan pakaian abdi dalem (Suyono dkk, 2016:76). Sultan Hamengku Buwono IX menanyakan kesanggupan Soeharto untuk melakukan serangan serentak di Yogyakarta. Serangan secara serentak akhirnya dilaksanakan pada 1 Maret 1949, pada pukul 06.00, yaitu sirine tanda habisnya jam malam. Para gerilyawan mengepung berbagai penjuru di kota Yogyakarta. Sub Werhkreis 102 yang masuk dari keraton menguasai pos Keben dan Pagelaran, Kompi Widodo terlibat kontak senjata di Pakualaman dan oasukan

Belanda yang mundur terus dikejar hingga pabrik Waston dan Malioboro. Tidak lama kemudian daerah Tugu dapat dikuasai gerilyawan (Soekamto, 2009:71). Sasaran utama adalah pos kedudukan Belanda yang berada di kota. Pasukan Belanda tidak dapat memberikan perlawanan akibat serangan mendadak pasukan gerilyawan (Kutoyo, 1996:173). Atas saran

Sultan Hamengku Buwono IX diputuskan pasukan gerilyawan ditarik mundur. Keputusan Sultan diambil setelah mengetahui ada kiriman pasukan Belanda dari Magelang (Soekamto, 2009:71). Menghindari serangan balasan dari pihak Belanda, akhirnya gerilyawan mundur dari kota Yogyakarta. Penarikan mundur merupakan cara Sultan untuk mengurangi korban jiwa. Sehingga pasukan Belanda tidak sempat melakukan serangan balasan. Hal ini membuat Belanda gagal untuk melancarkan propaganda bahwa Republik Indonesia gagal merdeka.

c. Perjuangan Diplomasi dalam Konferensi Meja Bundar 1949
Serangan serentak yang dilakukan pada 1 Maret 1949 ternyata mampu memberikan

perhatian internasional. Berita serangan tersebut akhirnya sampai terdengar di PBB. Propaganda Belanda yang mengatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Anggapan Republik Indonesia sudah tidak memiliki tentara pertahanan dapat dibantah (Darban, 1998:46). Belanda tidak dapat menghindar lagi dan PBB menginginkan untuk menyelesaikannya di dalam meja diplomasi.

Sultan Hamengku Buwono IX mengadakan pertemuan dengan Sukarno di Bangka untuk rencana pengembalian ibukota di Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono IX ingin bertanggungjawab atas situasi di Yogyakarta, sehingga Sukarno menandatangani mandat pemberian kekuasaan penuh untuk menjalankan pemerintahan setelah Belanda pergi dari Yogyakarta. Sukarno kemudian menandatangani mandat tersebut pada tanggal 1 Mei 1949 (Suyono, 2016:11-12). Sehingga segala urusan persiapan sampai penyerahan kedaulatan dalam rangkaian Konferensi Meja Bundar di Jakarta dilaksanakan dalam pimpinan Sultan Hamengku Buwono IX.

Sultan Hamengku Buwono IX yang memegang kuasa penuh bertugas untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya dari Belanda, baik sipil maupun militer

atas Yogyakarta. Selain itu, Sultan juga diberikan kuasa penuh untuk mempergunakan segala alat pemerintahan, seperti tentara, polisi, pamong praja, dan pegawai-pegawai Republik Indonesia lainnya. Pada masa peralihan ini, Sultan mengitruksikan kepada kementrian dan jawatan pemerintahan pusat Republik Indonesia yang bertugas di Yogyakarta untuk membantu tugas Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Negara dan Kordinator Keamanan. Sultan Hamengku Buwono IX juga mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan kemerdekaan berkumpul dan bersidang. Hal ini berkaitan dengan keamanan rakyat pada masa peralihan. Peraturan ini tidak bermaksud untuk mengurangi hak sebagai warga negara dan peraturan akan dicabut ketika keadaan Republik Indonesia dapat kembali stabil keadaannya. Peraturan dilarang bersidang dan arak-arakan dijalankan karena suatu tindakan yang darurat. Sehingga keadaan arak-arakan dan bersidang tanpa ijin pihak Republik Indonesia akan dihukum selama 1 tahun penjara. Apabila rakyat memaksa untuk mengadakan rapat tertutup atau pertemuan lainnya yang bersifat umum atau arak-arakan. Hal tersebut harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Kepala Staf Keamanan, pemimpin Pemerintah Militer Kabupaten, ataupun badan pemerintah yang ditunjuk oleh instansi pemerintah. Sehingga tidak ada celah untuk melakukan tindakan yang dapat memicu konflik untuk membatalkan kesepakatan antara Republik Indonesia dan Belanda.

Selain mengatur mengenai tugas pemerintah pusat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX, pada tanggal 1 Juni 1949 menetapkan pembentukan Panitia Penyambutan Kedatangan Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Panitia tersebut bertugas mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut kedatangan para pemimpin pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta (Ratmanto, 2012:139-140). Setelah itu, barulah pemerintahan Republik Indonesia dapat memikirkan berjalannya Konferensi Meja Bundar

Sukarno tidak hadir dalam proses penandatanganan penyerahan kedaulatan di Jakarta. Hal ini berkaitan dengan alasan politik, sebab Sukarno tetap pada pandangan bahwa kemerdekaan yang merupakan hasil dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Permasalahannya, jika Sukarno menandatangani

perjanjian tersebut akan menimbulkan kesan bahwa kemerdekaan adalah hadiah dari Belanda. Maka Sukarno mengutus Sultan Hamengku Buwono IX agar kondisi tersebut tidak melekat pada bangsa Indonesia (Sunoyo dkk, 2016:30). Selain sebagai pengganti posisi Sukarno sebagai penandatanganan penyerahan kedaulatan, menurut Moh. Roem dalam Atmakusuma (2011:154), posisi Sultan Hamengku Buwono IX sebagai ketua delegasi Indonesia adalah penghapus perjanjian yang mengekang dan menindas raja-raja serta sultan-sultan diberbagai daerah yang masih memiliki status daerah istimewa Sultan Hamengku Buwono IX Menjaga Keamanan Negara Tahun 1950

Konflik antara Republik Indonesia dan Belanda dapat diselesaikan dalam Konferensi Meja Bundar. Konsekuensi setelah diadakan Konferensi Meja Bundar adalah merubah bentuk negara Indonesia menjadi federal. Ternyata isi dari perjanjian Konferensi Meja Bundar juga dapat menimbulkan konflik baru. Permasalahan yang ditimbulkan adalah rakyat diberbagai negara bagian menolak bentuk negara federalis. Sehingga menimbulkan gerakan rakyat untuk kembali menjadi negara persatuan. Sedangkan para pengikut aliran federalisme tidak menginginkan perubahan bentuk negara. Hal inilah yang mengakibatkan para pengikut aliran federalis lebih memilih untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah.

a. Peristiwa Westerling

Konflik pertama setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat adalah pemberontakan Westerling dengan menggunakan tentara buaatannya, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Tujuan APRA dan kaum federalis yang ada di belakangnya ialah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara tersendiri di negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Padahal dalam Konferensi Antara-Indonesia di Yogyakarta telah disetujui bahwa APRIS adalah Angkatan Perang Nasional (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010:345). Westerling memanfaatkan para tokoh federalis untuk merancang serangan. Salah satunya adalah tokoh penting yang berada dalam kubu kaum federalis adalah Sultan Hamid II.

Setelah Bandung diserbu, kabinet mengadakan sidangnya dan diadakan oleh Dewan Menteri pada tanggal 24 Januari 1950. Sultan Hamengku Buwono IX yang bertanggungjawab dalam pertahanan dan keamanan di seluruh Indonesia tidak dapat melakukan sidang. Sultan Hamengku Buwono IX melakukan rapat khusus dengan Staf Militer dan membahas penyerbuan APRA di Bandung. Mr. Ali Budihardjo menjadi pengganti Sultan Hamengku Buwono IX dalam sidang kabinet (PERSAJA, 1955:93). Hal ini dilakukan untuk memperbanyak informasi dan cara untuk mencegah APRA melakukan penyerangan lanjutan. Sehingga persiapan pertahanan negara dan tidak memakan korban jika benar-benar terjadi penyerangan.

Pemberontakan APRA akhirnya sampai di Jakarta pada saat dilaksanakan sidang kabinet lanjutan pada tanggal 26 Januari 1950. Westerling bekerjasama dengan Sultan Hamid II untuk menyerang gedung tempat diselenggarakan kabinet RIS. Tujuannya adalah menculik dan membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekertaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budihadjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan

Perang Kolonel T.B. Simatupang (Abdullah dan Lopian, 2012:10). Serangan Westerling dan Sultan Hamid II tersebut gagal, karena Sultan Hamengku Buwono IX mendapat laporan dari Gubernur Militer Jakarta beserta Stafnya mengenai adanya penyerbuan sidang kabinet (PERSADJA, 1955:94). Sehingga sebelum sidang kabinet diadakan, maka dilaksanakan kordinasi untuk mencegah penyerangan.

Sementara itu di luar gedung, pasukan Batalyon X KNIL dan Westerling sudah bersiap-siap. Akan tetapi Westerling memahami situasi yang tidak sesuai rencananya dan bergegas untuk melarikan diri ke Belanda. Westerling berhasil mencapai Tanjungpriuk dan sampai di Singapura menggunakan pesawat terbang Catalina (Kutoyo, 1996:193). Westerling akhirnya lolos dari pengejaran dan bebas ketika sampai di Belanda. Sehingga Westerling tidak sempat di adili di Indonesia dan merubah status tersangka kepada Sultan Hamid II. Pemberontakan ini tidak sampai terjadi dan memakan korban jiwa.

Sultan Hamengku Buwono IX mempersiapkan rencana penangkapan Sultan Hamid II. Penangkapan dilakukan sesuai prosedur penangkapan pejabat negara. Sultan Hamengku Buwono IX mengajukan surat perintah penangkapan Sultan Hamid II kepada Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan Sekretaris Kabinet Abdul Karim Pringgodigdo (Suyono dkk, 2016:98). Surat penangkapan Sultan Hamid II disetujui dan Sultan Hamengku Buwono IX diberi wewenang untuk proses penangkapan. Prosedur ini dilakukan karena Sultan Hamid II merupakan pejabat negara, yaitu menteri negara. Akhirnya Sultan Hamid II berhasil ditangkap. Sehingga keamanan petinggi negara terjamin kembali.

b. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Permasalahan mengenai tuntutan dari rakyat untuk mengganti sistem pemerintahan federal menjadi negara kesatuan. Permasalahan ini terwujud dan dapat diselesaikan, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan RI, Kabinet Natsir dilantik dan kebanyakan anggotanya merupakan orang-orang yang berpengalaman dan dihormati. Kedudukan di dalam kabinet terdapat orang-orang nonpartai tetapi sudah terbukti kemampuannya, antara lain Sultan Hamengku Buwono IX yang menduduki jabatan Wakil Perdana Menteri, dr. Abdul Halim sebagai Menteri Pertahanan, dan Mr. Assaat sebagai Menteri Dalam Negeri (Abdullah dan Lopian, 2012:25). Setelah pembentukan Kabinet Natsir dapat dikatakan menghapus bentuk pemerintahan federalisme dan menjadi sepenuhnya gerakan negara kesatuan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, Sultan Hamengku Buwono IX dengan latar belakang kehidupan yang mempelajari dan menerapkan sikap demokratis dan optimis, bermanfaat sebagai proses kecintaannya dan mempertahankan RI. Kedua, dalam proses mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1950, Sultan Hamengku Buwono IX berhasil memindahkan ibukota dan menyediakan berbagai fasilitas bagi pemerintahan RI. Belanda berhasil dipatahkan propagandanya ketika

para pemimpin RI diasingkan. Sultan menyusun strategi serbuan serentak pada 1 Maret 1949. Sehingga Belanda tidak berkutik dan melanjutkannya dalam diplomasi KMB. Hal ini mengakibatkan bentuk negara menjadi federal dan mengakibatkan pemberontakan westerling. Akan tetapi Sultan Hamengku Buwono IX berhasil mencegah dan membuat rakyat menginginkan kembalinya bentuk negara menjadi kesatuan.

Berdasarkan simpulan di atas terdapat beberapa saran berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai pemikiran Tan Malaka tentang Revolusi Indonesia tahun 1945-1949 diharapkan bagi pembaca, penulisan mengenai pemikiran tokoh Tan Malaka tentang Revolusi Indonesia dapat dijadikan alternatif untuk sumber belajar menyangkut Sejarah Indonesia, dan sejarah intelektual atau sejarah pemikiran tokoh Indonesia. Bagi penulis, penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga untuk para pembaca diharapkan kedepannya bukan hanya dijadikan sebagai referensi agar dapat mengembangkan penelitian yang telah dilakukan, namun juga dapat memberikan kontribusi untuk menyempurnakannya. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ony Widiarto sebagai penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Drs. Sugiyanto, M. Hum., selaku dosen pembimbing I dan kepada bapak Drs. Marjono, M. Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran hingga terselesaikannya skripsi dan penulisan jurnal ini. Kepada bapak Drs. Sumarjono, M.Si., selaku dosen penguji I, serta bapak Dr. Nurul Umamah M.Pd., selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan evaluasi dalam penyempurnaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan semangat, serta teman-teman yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T dan Lapian, A,B. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah 6: Perang dan Revolusi. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdullah, T dan Lapian, A,B. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah 7: Pascarevolusi. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Adams, C. 2014. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Jakarta: Yayasan Bung Karno. Atmakusumah. 2011. Takhta Untuk Rakyat; Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta: PT. Gramedia.
- Baskoro, H dan Sunaryo. 2010. Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya. Yogyakarta:
- Darban, A. A., Sri, S., Nurcahyo, A. L., Setyawati, N., dan Nurdiyanto. 1998. Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamenku Buwana IX. Jakarta: Depdikbud.
- Gottschalk, L. 1969. Mengerti Sejarah. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hadi, P dan Majidi, N. 2013. Sultan Hamengku Buwono IX: Inspiring Prophetic Leader. Jakarta: IRIS.
- Kutoyo, S. 1996. Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Riwayat Hidup dan Perjuangan. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- PERSADJA. 1955. "Proses Peristiwa Sultan Hamid II". Jakarta: Penerbit Fasco.
- Peoesponegoro, M. D. dan Notosusanto, N. 2010. Sejarah Nasional Jilid VI- Jaman Jepang dan Jaman Republik. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ratmanto, A. 2012. Mengawal Transisi: Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pemerintahan Transisi Republik Indonesia Di Yogyakarta 1949. Jakarta: Mata Padi Pressindo.
- Sebuah Presentasi Majalah Tempo. 1988. Sri Sultan: Hari-Hari Hamengku Buwono IX. Jakarta: PT Grafiti.
- Sumiyati, S. E., Chidmad, T., dan Hartono, B. 2001. Pelurusan Sejarah: Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Soekamto, R, E. 2009. Yogyakarta: Ibukota Perjuangan. Yogyakarta: NARASI.
- Suyono, S. J. dkk. 2016. Hamengku Buwono IX: Pengorbanan Sang Pembela Republik. Jakarta: KPG.
- Widyatama, B. 2017. Demokrasi sebagai Siasat Menafsirkan Tapak Politik Demokrasi Sultan Hamengku Buwono IX. Yogyakarta: PolGov